ABSTRAK

A.SUPRIADI, 2021, *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Pulang Pisau*, Jurusan Hukum Tatanegara Islam (SiyasahSyar'iyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing : (1) Drs. H. Hamdan Mahmud, M.Ag, (2) Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si

Kata Kunci: efektif, peran pemerintah dan masyarakat

Penelitian ini di landasi dengan adanya Peraturan Daerah terkait Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau. Merokok merupakan hal yang sering kita jumpai di Maasyarakat, hal buruk dari rokok adalah paparan asap rokok dan puntung rokok yang berserakan. Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk menjaga kesehatan Masyarakat, menurunkan angka perokok, serta meningkatkan udara yang bersih dan sehat.Namun, sampai saat ini masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap Peraturan tersebut. Oleh karena hal tersebutlah penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian tentang efektivitas penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di Kabupaten Pulang Pisau.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah dan Masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi kefektifan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan fakta-fakta empiris melalui pendekatan analitis. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah didapat tersebut diolah melalui proses pengecekan, klasifikasi, verifikasi dan hingga akhirnya data tersebut dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa peran Pemerintah dan peran Masyarakat sangatlah penting dalam penerapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok agar berjalan efektif. Namun, sampai saat ini Peraturan tersebut tidak berjalan efektif, diantaranya karna faktor-faktor berikut: Kurangnya sosialisasi/penyebarluasan informasi oleh Pemerintah, minimya minat baca Masyarakat terhadap Peraturan, rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan, pelanggaran yang terjadi di Pemerintahan, serta belum pernah diterapkannya sanksi bagi pelanggar Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini yang menyebabkan ketidakefektifan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok tersebut.